



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan I
2019

Penyusun:

Penanggung Jawab: Kepala Kanwil DJPb Prov. Riau | Ketua Tim:
Kepala Bidang PPA II | Editor: Hasan Fauzi, Henjang Prasetiawan |
I Anggota: Sugino | Syarifah Fauziah | Syafruddin | Rini Apriani

KANWIL DJTJEN
PERBENDAHARAAN
PROVINSI RIAU

DAFTAR ISI

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL	1
A. Produk Domestik Regional Bruto	1
B. Inflasi	2
C. Indikator Kesejahteraan	3
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	4
A. Pendapatan Negara	5
B. Belanja Negara	9
C. Prognosis Realisasi APBN	11
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	12
A. Pendapatan Daerah	14
B. Belanja Daerah	17
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2019	18
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	19
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	19
B. Pendapatan Konsolidasian	19
C. Belanja Konsolidasian	21
D. Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB	23
V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH	24
A. Permasalahan Infrastruktur di Provinsi Riau	24
B. Riau Berhak Dapatkan Perlakuan Khusus	25

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB Provinsi Riau triwulan I-2019 mencapai Rp184,51 triliun. Angka ini merupakan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia, terbesar kedua di luar pulau Jawa dan secara spasial berkontribusi sebesar 4,79% terhadap perekonomian nasional.

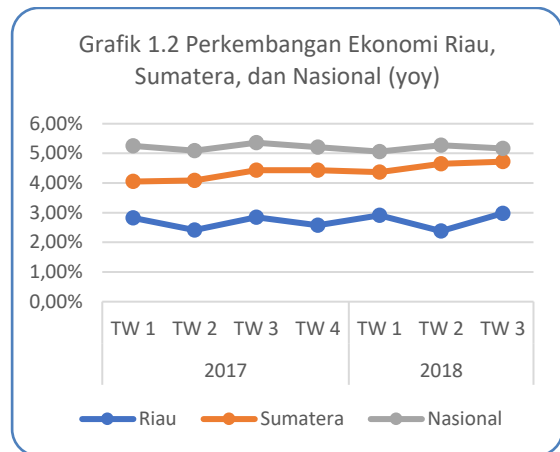
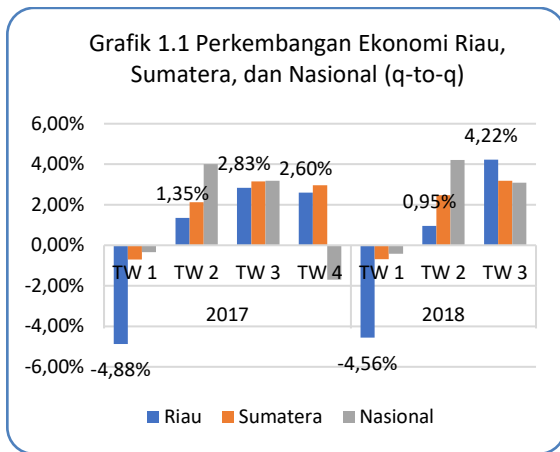
Ekonomi Riau triwulan I-2019 tumbuh sebesar 2,88% (y-on-y) lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar 2,84%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar minus 3,56% Jasa Lainnya merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,39%, diikuti oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,75% dan Industri Pengolahan sebesar 6,31%.

Struktur ekonomi Riau triwulan I-2019 dari sisi produksi didominasi oleh tiga lapangan usaha yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan (25,59%), diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian (25,47%) dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (22,77%). Pada triwulan yang sama tahun sebelumnya didominasi lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, kini didominasi oleh Industri Pengolahan.

Adapun dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen, kecuali komponen pengeluaran Ekspor Luar Negeri. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,23%, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,50% dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,25%.

Struktur ekonomi Provinsi Riau triwulan I-2019 secara pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 37,80%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 35,84%, dan Ekspor Barang dan Jasa (21,32%).

Adapun ekonomi Provinsi Riau triwulan I-2019 terhadap triwulan IV-2018 (q-to-q) terkoreksi sebesar minus 2,86%. Hal ini disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa ke Luar Negeri sebesar minus 30,59%, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar minus 10,01%, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar minus 0,01%, dan komponen Pengeluaran Rumah Tangga sebesar minus 1,48%. Sedangkan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga tumbuh sebesar 12,42%, erat kaitannya dengan persiapan partai politik mempersiapkan Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Legislatif tahun 2019.



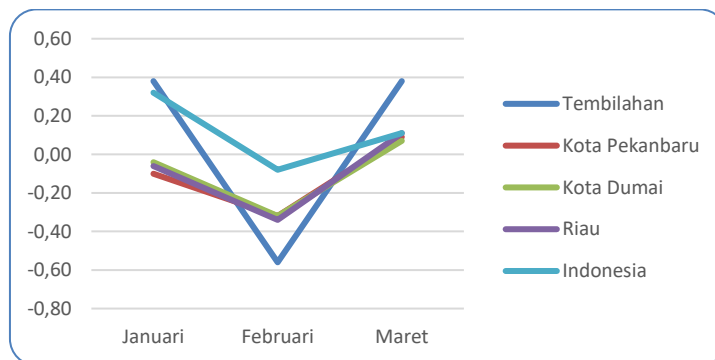
Sumber: BPS Provinsi Riau

B. Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi.

Inflasi bulanan (m-to-m) di Provinsi Riau berada pada level fluktuatif, dengan deflasi sebesar 0,06% pada bulan Januari 2019 dan deflasi sebesar 0,34 pada bulan Februari 2019 dan kemudian pada akhir triwulan I sebesar 0,11%, sama dengan tingkat inflasi nasional. Inflasi Riau bulan Maret 2019 terjadi karena adanya kenaikan harga pada enam kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,31%, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa komunikasi sebesar 0,18%, kelompok sandang sebesar 0,13%, kelompok bahan makanan sebesar 0,07%, kelompok kesehatan sebesar 0,03% dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,02%. Sedangkan satu kelompok mengalami deflasi yaitu kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,08%

Grafik 1.3 Tingkat Inflasi Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2019



Sumber: BPS Provinsi Riau

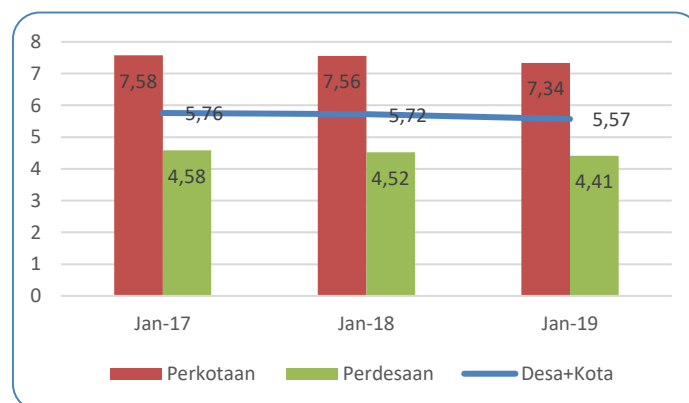
Dari tiga kota yang disurvei di Riau, semua kota mengalami inflasi tertinggi terjadi di Tembilahan, jauh melebihi tingkat inflasi nasional, yaitu sebesar 0,38%, disusul Kota Pekanbaru sebesar 0,09%, disusul Dumai sebesar 0,07%.

C. Indikator Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan penduduk dipengaruhi oleh banyak hal, di antaranya penyebaran pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Semakin sejahtera suatu daerah maka semakin sedikit jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau bulan Maret 2018 sebanyak 500.44 ribu jiwa atau sebesar 7,39% dari total penduduk Provinsi Riau menurun 0,39 poin dari periode Maret 2017 yang berjumlah 514.62 ribu jiwa atau 7,78%. Kemiskinan ini tersebar di Perkotaan (6,35%) dan Pedesaan (8,09%). Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,28%. Hal ini sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan secara nasional yang menurun dari 10,64% pada Maret 2017 menjadi 9,92% pada Maret 2018.

Indikator lain untuk menilai kesejahteraan daerah adalah jumlah angkatan kerja dan tingkat pengangguran. Angkatan kerja di Riau bulan Februari 2019 sebanyak 3,30 juta orang, tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dengan penduduk bekerja sebanyak 3,11 juta orang. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2018 sebanyak 183,7 ribu atau sebesar 5,57%, menurun sebesar 0,15% dari periode yang sama tahun lalu yang berjumlah 188,41 ribu orang. TPT di perkotaan sebesar 7,34%, cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan yang hanya 4,41%.

Grafik 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Riau 2017-2019



Sumber: BPS Provinsi Riau

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Pada tahun 2019 Provinsi Riau mempunyai target pendapatan sebesar Rp3,94 triliun dan pagu belanja sebesar Rp34,97 triliun. Target pendapatan ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp17,95 triliun. Target pendapatan tersebut seluruhnya berasal dari penerimaan dalam negeri, berupa penerimaan perpajakan dan PNBPN. Sementara pagu belanja justru mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp29,75 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah. Pagu belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp7,99 triliun turun dari tahun sebelumnya Rp8,09 triliun, sementara transfer ke daerah dan dana desa mengalami kenaikan yang signifikan menjadi sebesar Rp26,97 triliun dari sebelumnya Rp21,65 triliun.

**Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2018 dan Tahun 2019**

(dalam miliar Rp)

Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA	17.945	2.787	3.941	2.589
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	17.945	2.787	3.941	2.589
1. Penerimaan Pajak	17.311	2.573	3.325	2.322
2. PNBPN	634	214	616	266
II. HIBAH	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	29.751	5.944	34.967	7.403
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	8.098	987	7.999	1.233
1. Belanja Pegawai	2.785	509	2.746	563
2. Belanja Barang	3.300	376	3.458	500
3. Belanja Modal	1.997	101	1.775	170
4. Belanja Bantuan Sosial	16	0	21	1
5. Belanja Lain-lain	-	-	-	-
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	21.653	4.957	26.968	6.170
1. Transfer ke Daerah	20.393	4.795	25.531	6.062
a. Dana Perimbangan	20.239	4.750	25.286	5.963
1) Dana Bagi Hasil	7.748	1.492	10.982	2.137
2) Dana Alokasi Umum	8.147	2.792	8.991	2.964
3) Dana Alokasi Khusus	4.344	466	5.314	764
b. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
c. Dana Keistimewaan Yogyakarta	-	-	-	-
d. Dana Transfer Lainnya	154	45	245	99
2. Dana Desa	1.260	162	1.437	108
SURPLUS DEFISIT	(11.806)	(3.157)	(31.026)	(4.815)

Sumber: SPAN, Kanwil DJP Riau Kepri, Kanwil DJBC Riau

A. Pendapatan Negara

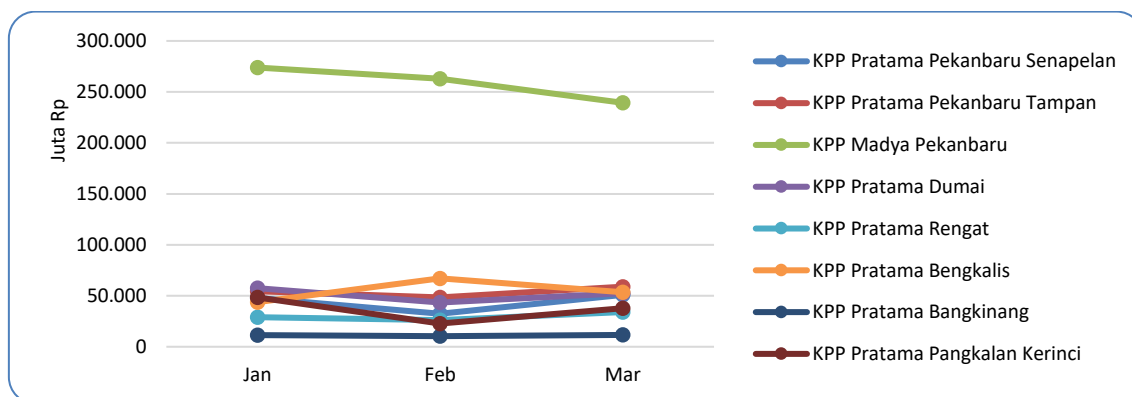
1. Penerimaan Perpajakan

Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2019, penerimaan perpajakan dapat direalisasikan sebesar Rp2,32 triliun atau 69,84% dari target, yang terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp2,26 triliun dan pendapatan pajak internasional Rp64,92 miliar. Kontribusi penerimaan perpajakan terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh), mencapai Rp1,62 triliun (65,77%) dan 47,97% di antaranya atau Rp776,04 miliar diperoleh KPP Madya Pekanbaru.

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan PPh di Provinsi Riau sampai dengan akhir triwulan I tahun 2019 menyumbang Rp1,62 triliun atau 65,77% dari total penerimaan perpajakan dan terealisasi 97,67% dari targetnya. Penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar Rp100,12 miliar dibandingkan dengan penerimaan pada periode yang sama tahun 2018.

**Grafik 2.1 Realisasi Penerimaan PPh per KPP
Lingkup Provinsi Riau Tahun 2019 (dalam Juta Rp)**



Sumber: Kanwil DJP Riau Kepri (diolah)

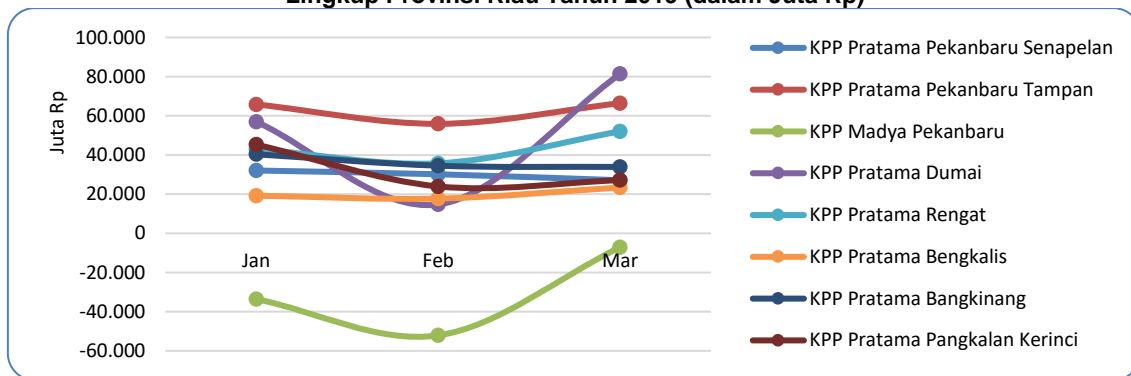
Penerimaan PPh sebagian besar berasal dari KPP Madya Pekanbaru dengan total realisasi Rp776,04 miliar atau 47,92%, sedangkan kontributor terendah KPP Pratama Bangkinang hanya menyumbang Rp33,25 miliar atau 2,06%. Penerimaan PPh terbanyak terjadi di bulan Januari 2019 sebesar Rp566,02 miliar dan terkecil di bulan Februari Rp513,46 miliar.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerimaan PPN tercatat Rp734,10 miliar atau 29,84% dari total penerimaan perpajakan dan merupakan penerimaan terbesar kedua setelah penerimaan PPh. Penerimaan PPN pada periode triwulan I 2019 mengalami penurunan Rp240,14 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Target penerimaan ini berhasil dicapai 55,69%.

Penerimaan PPN tahun 2019 berasal dari delapan KPP yang tersebar di Provinsi Riau dengan capaian tertinggi diraih oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebesar Rp188,14 miliar (25,63%), diikuti oleh KPP Pratama Dumai senilai Rp153,12 miliar atau 20,86% dan KPP Pratama Rengat sebesar Rp130,80 miliar atau 17,82% dari total penerimaan. Penerimaan terbesar terjadi di bulan Maret sebesar Rp304,27 miliar.

**Grafik 2.2 Realisasi Penerimaan PPN per KPP
Lingkup Provinsi Riau Tahun 2019 (dalam Juta Rp)**

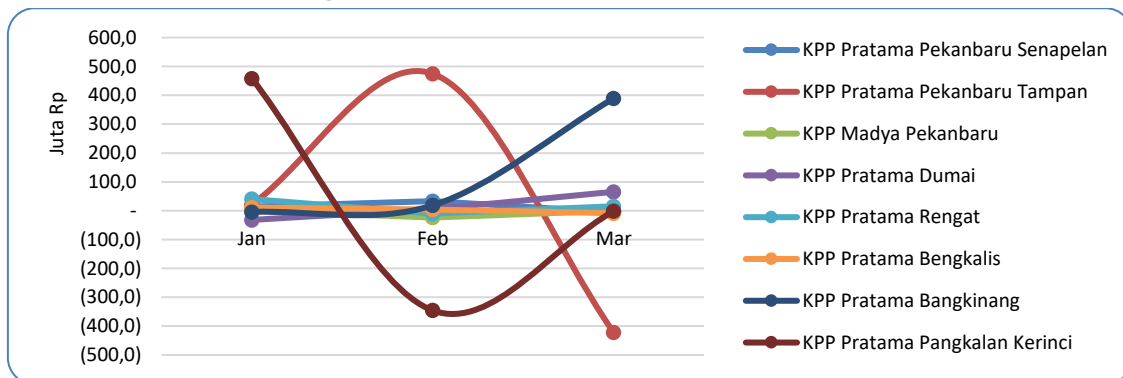


Sumber: Kanwil DJP Riau Kepri (diolah)

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Penerimaan PPnBM di Provinsi Riau diuraikan dalam grafik sebagai berikut:

**Grafik 2.3 Realisasi Penerimaan PPnBM per KPP
Lingkup Provinsi Riau Tahun 2019 (dalam Juta Rp)**



Sumber: Kanwil DJP Riau (diolah)

Penerimaan PPnBM terealisasi 36,87% (Rp0,7 miliar) dan hanya berkontribusi 0,03% dari total penerimaan perpajakan, turun Rp4,47 miliar dibandingkan triwulan I 2018, sebagian besar berasal dari KPP Pratama Bangkinang sebesar Rp403,64 juta (57,65%). Penerimaan terbesar terjadi di bulan Januari sebesar Rp508,99 juta.

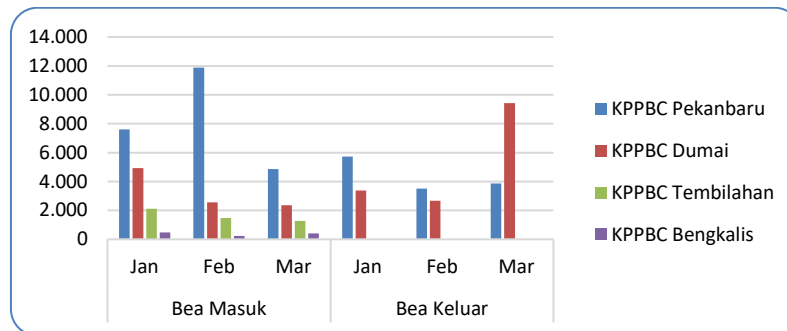
d. Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan pajak perdagangan internasional sampai dengan akhir triwulan I tahun 2019 mencapai Rp68,74 miliar, 23,33% dari target penerimaan, yang terdiri dari penerimaan bea masuk Rp40,16 miliar dan penerimaan bea keluar sebesar Rp28,57

miliar. Penerimaan pajak ini memberikan kontribusi terhadap total penerimaan perpajakan sebesar 2,79%.

Penerimaan pajak perdagangan internasional terbesar berada di KPPBC Pekanbaru dengan total penerimaan Rp37,47 miliar, diikuti KPPBC Dumai sebesar Rp25,32 miliar. Penerimaan terbesar terjadi di bulan Januari sebesar Rp24,22 miliar, diikuti penerimaan bulan Februari sebesar Rp22,32 miliar.

Grafik 2.4 Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional per KPPBC Lingkup Provinsi Riau Tahun 2019 (dalam Juta Rp)



Sumber: Kanwil DJBC Riau (diolah)

KONTAN.CO.ID - PEKANBARU. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau bersama Gubernur Riau dan Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, Kamis (2/5), menandatangani kesepakatan bersama tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah. Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut menandai sejumlah poin kerja sama penting antara DJP dengan pemerintah daerah Riau terkait penerimaan perpajakan di daerah tersebut. DJP dan pemerintah daerah Riau akan mengarahkan sumber daya yang dimiliki untuk mengadakan penggalian potensi di bidang perkebunan sawit dan industri pengolahannya. Sebab, terdapat potensi besar yang belum tergali dari sektor ini. Sebagai gambaran, Data Dinas TPH Bun Riau 2018 menyatakan terdapat 1 juta hektar perkebunan yang tersebar di seluruh Provinsi Riau yang belum memiliki izin.

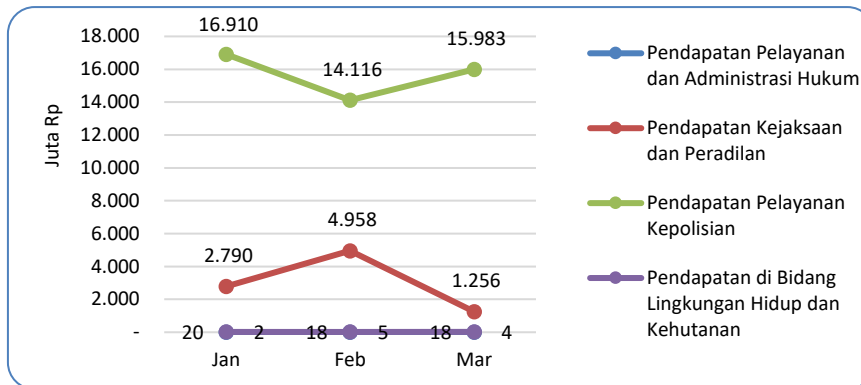
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Provinsi Riau sampai akhir Maret 2019 berjumlah Rp266,34 miliar dan berkontribusi terhadap pendapatan negara di Provinsi Riau sebesar 10,29%. Jumlah ini lebih meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp214,36 miliar. Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar Rp114,12 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp 152,21 miliar. Pendapatan PNBP Lainnya didominasi oleh pendapatan administrasi dan penegakan hukum dengan realisasi Rp56,08 miliar dan pendapatan jasa transportasi, komunikasi dan informatika sebesar Rp31,83 miliar.

a. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum

Penerimaan pendapatan administrasi dan penegakan hukum di Provinsi Riau pada triwulan I 2019 sebesar Rp56,08 miliar atau 21,05% dari total penerimaan PNBP.

Grafik 2.5 Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum Lingkup Provinsi Riau Tahun 2019 (dalam Juta Rp)



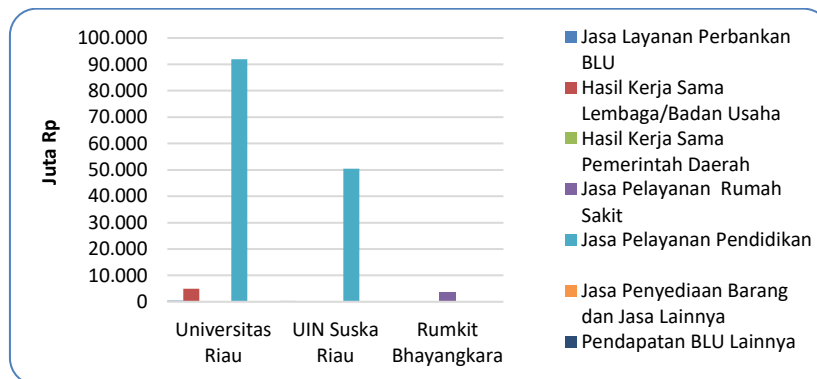
Sumber: SPAN (diolah)

Pendapatan administrasi dan penegakan hukum sebagian besar berasal dari pendapatan kepolisian, seperti pendapatan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Pendapatan BPKB, penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan pendapatan TNKB dengan total Rp47 miliar. Penerimaan ini tertinggi berada di bulan Januari sebesar Rp19,72 miliar.

b. Pendapatan BLU

Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2019 pendapatan BLU tercatat Rp152,21 miliar. Pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 57,15% dari total PNBP.

Grafik 2.6 Realisasi Pendapatan BLU per Jenis Pendapatan Lingkup Provinsi Riau Tahun 2019 (dalam Juta Rp)



Sumber: SPAN (diolah)

Penerimaan BLU terbesar adalah jasa pelayanan pendidikan dengan realisasi sebesar Rp142,38 miliar yang berasal dari satker UIN Suska Riau dan Universitas Riau. Jasa penerimaan pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp3,45 miliar berasal dari satker Rumkit Bhayangkara Pekanbaru. Realisasi pendapatan BLU triwulan I tahun 2019 terbesar diperoleh Universitas Riau sebesar Rp97,72 miliar, diikuti pendapatan dari UIN Rp50,90 miliar dan Rumkit Bhayangkara sebesar Rp3,45 miliar.

Jakarta, 04/01/2011 MoF (Fiscal) News - Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah melampaui target, terutama berkaitan dengan terlampauinya target penerimaan Sumber Daya Alam non migas dan PNBP lainnya. Demikian disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Askolani saat konferensi pers di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (04/01).

Realisasi PNBP pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 mencapai Rp267,5 triliun atau 108,2% dari sasaran APBN-P 2010 yang sebesar Rp247,2 triliun. Angka ini mengalami kenaikan Rp40,3 triliun atau 17,8% dari realisasi PNBP tahun 2009 yang sebesar Rp227,2 triliun.

3. Pendapatan Hibah

Penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Pendapatan hibah merupakan salah satu komponen APBN sebagai bagian dari pendapatan/penerimaan negara yang harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBN, baik hibah langsung maupun hibah tidak langsung. Sampai dengan triwulan I 2019 tidak terdapat pagu dan realisasi pendapatan hibah di Provinsi Riau.

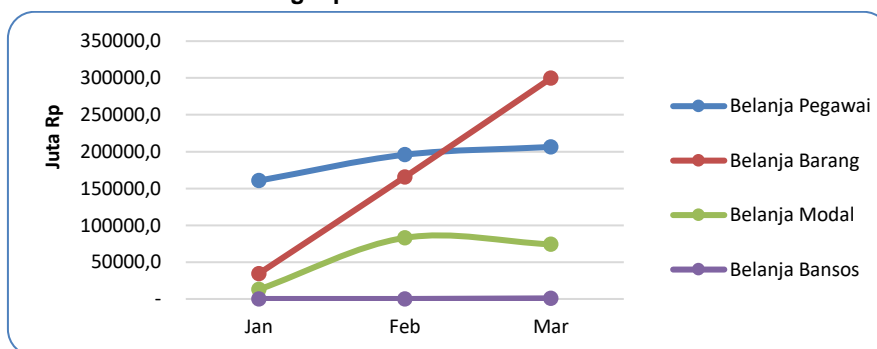
B. Belanja Negara

Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.

1. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat di Provinsi Riau berupa belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial dengan total pagu sebesar Rp7,80 triliun, turun Rp99 miliar dibandingkan pagu tahun 2018.

**Grafik 2.7 Tren Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Lingkup Provinsi Riau Tahun 2019**



Sumber: SPAN (diolah)

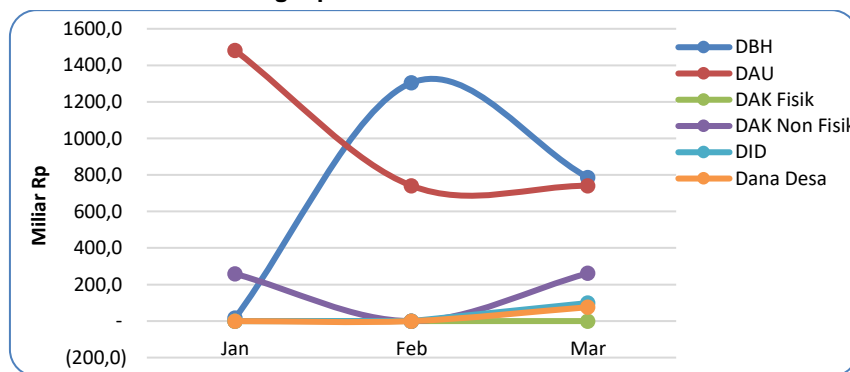
Belanja yang dapat direalisasikan sampai dengan triwulan I tahun 2019 tercatat Rp1,23 triliun atau 15,79% dari pagu belanja, yang terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp562,74 miliar, belanja barang Rp499,64 miliar, belanja modal Rp170,00

miliar, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp0,84 miliar. Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Maret senilai Rp580,92 miliar. Total realisasi belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang terealisasi Rp987 miliar

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2019 di Provinsi Riau mencapai Rp26,97 triliun. Jumlah ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp21,65 triliun. Realisasi TKDD sampai dengan akhir Maret 2018 sebesar Rp5,76 triliun atau 21,38% dari total pagu. Jumlah ini berada di atas realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,96 triliun.

**Grafik 2.8 Tren Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa
Lingkup Provinsi Riau Tahun 2019**



Sumber: Simtrada (diolah)

Realisasi TKDD terbanyak adalah transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,96 triliun, diikuti transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,1 triliun, sedangkan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik belum ada penyaluran. Realisasi tertinggi TKDD terjadi di bulan Februari dengan total realisasi sebesar Rp2,04 triliun.

3. Pengelolaan BLU

Perkembangan pagu belanja BLU diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau Tahun 2018 dan 2019

Satker BLU	2018				2019			
	RM		BLU		RM		BLU	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Universitas Riau	213.317	38.176	237.600	33.557	212.777	37.921	250.050	44.818
UIN Sultan Syarif Kasim Riau	171.153	16.145	125.708	7.132	149.509	17.759	111.088	6.762
Rumkit Bhayangkara Pekanbaru	5.122	808	21.364	3.655	5.016	812	18.452	3.569
Total	389.592	55.129	384.672	44.344	367.301	56.491	379.591	55.149

Sumber: SPAN (diolah)

Pagu belanja satuan kerja (Satker) BLU tahun 2018 turun, baik pagu belanja yang berasal dari Rupiah Murni (RM) maupun dari pendapatan BLU. Meskipun demikian porsi pagu belanja sumber dana BLU meningkat dari 49,68% menjadi 50,82% dari total pagu. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian BLU untuk membiayai kebutuhan belanjanya semakin baik. Lebih lanjut, realisasi belanja mengalami peningkatan, baik secara nominal maupun persentase untuk sumber dana BLU, yaitu dari 12,85% pada triwulan I 2018 menjadi 14,95% pada triwulan I tahun 2019.

4. Manajemen Investasi Pusat

Investasi pusat yang ada di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dalam bentuk kredit program. Piutang negara yang berstatus aktif tersebar di 5 debitur, yaitu empat debitur Pemerintah Daerah dan satu debitur BUMD. Namun, saat ini hanya terdapat dua debitur yang masih mempunyai hutang kepada pemerintah pusat dengan total sebesar Rp20,41 miliar. Kedua debitur tersebut saat ini sedang dalam proses restrukturisasi pinjaman melalui mekanisme *debt swap* (menunggu hasil verifikasi BPKP), sedangkan sisanya telah melunasi hutangnya.

Sementara itu, kredit program yang ada di Provinsi Riau berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu modal kerja usaha kecil dan menengah guna meningkatkan kegiatan usahanya. Kredit program di Provinsi Riau pada akhir Maret 2019 telah disalurkan sejumlah Rp7,708 triliun tahun lalu Rp407,56 triliun dengan total debitur sebanyak 17.769 tahun lalu 9.990 debitur, terbanyak skema KUR Kecil sebesar Rp428,31 miliar dan KUR Mikro Rp342,53 miliar KUR TKI 0,42 miliar. Kredit program terbanyak tersebar di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu masing-masing sebesar Rp118,42 miliar dan Rp85,63 miliar.

C. Prognosis Realisasi APBN

Perkiraan pendapatan negara dan belanja negara yang dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun 2019 di lingkup Provinsi Riau menggunakan analisis *forecasting* dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Perkiraan pendapatan negara mempertimbangkan perkembangan perekonomian di dunia, maupun di Indonesia dan regional serta perkembangan tingkat inflasi terkini, sedangkan perkiraan belanja negara dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang tengah dilaksanakan pemerintah, seperti program prioritas nasional pemerintah, nawacita, dan gerakan efisiensi belanja.

Pendapatan negara hingga akhir tahun 2019 diperkirakan dapat direalisasikan sebesar Rp16,77 triliun. Perkiraan realisasi pendapatan meningkat dibandingkan

dengan realisasi pendapatan negara tahun 2018 Rp16,26 triliun. Perkiraan kenaikan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang berada di level 2,88% (y-on-y) lebih baik dari tahun sebelumnya 2,84%. Sementara itu, perkiraan belanja negara yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar Rp30,93 triliun atau 88,45% dari pagu belanja. Perkiraan realisasi ini berada di atas realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar 29,94 triliun.

Berikut disajikan perkiraan realisasi APBN sampai dengan akhir tahun 2019 di Provinsi Riau.

Tabel 2.3 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau s.d. Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi thd Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi
Pendapatan Negara	3.941	2.589	65,68	16.766	425,40
Belanja Negara	34.967	7.403	21,17	30.929	88,45
Surplus/Defisit	(31.026)	(4.815)	15,52	(14.163)	45,65

Sumber: SPAN dan hasil prognosis menggunakan *forecasting*

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Selain itu, APBD juga sangat berguna untuk mengetahui komposisi anggaran dan prioritas kegiatan suatu daerah. Secara agregat total APBD tahun anggaran 2019 di Provinsi Riau sebesar Rp32,59 triliun untuk target pendapatan, pagu belanja sebesar Rp28,41 triliun dan defisit sebesar Rp221,61 miliar.

Tabel 3.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2018 dan Tahun 2019

(dalam miliar Rp)

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
PENDAPATAN	30.826,97	6.592,81	21,39	32.595,34	6.623,01	20,32
PAD	7.060,48	1.040,39	14,74	6.597,70	1.112,21	16,86
Pajak Daerah	4.798,53	750,88	15,65	4.741,69	871,85	18,39
Retribusi Daerah	358,82	34,92	9,73	322,97	32,58	10,09
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	418,35	116,63	27,88	357,82	0,36	0,10
Lain-Lain PAD yang Sah	1.484,79	137,96	9,29	1.175,23	207,43	17,65
Pendapatan Transfer	23.662,94	5.551,60	23,46	25.808,27	5.492,03	21,28

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	20.960,95	5.290,55	25,24	22.846,08	5.271,18	23,07
Dana Bagi Hasil Pajak	4.347,69	987,2	22,71	4.825,56	555,17	11,50
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	4.151,43	1.017,92	24,52	4.607,73	1.230,28	26,70
Dana Alokasi Umum	8.386,63	2.871,16	34,23	8.954,07	2.963,78	33,10
Dana Alokasi Khusus	4.075,19	414,26	10,17	4.458,71	521,95	11,71
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1.569,15	235,68	15,02	1.660,01	134,65	8,11
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	1.569,15	235,68	15,02	1.436,69	105,47	7,34
Dana Insentif Daerah	-	-	0,00	223,33	29,18	13,06
Transfer Pemerintah Provinsi	1.101,28	25,37	2,30	1.209,45	57,93	4,79
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	1.101,28	25,37	2,30	1.209,45	29,28	2,42
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	28,66	
Transfer Bantuan Keuangan	31,56	-	-	92,73	28,27	30,49
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov./Kabupaten/Kota Lainnya	31,56	-	-	92,73	28,27	30,49
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	103,55	0,81	0,78	189,36	18,77	9,91
Pendapatan Hibah	103,55	0,77	0,74	132,35	0,80	0,60
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	17,97	
Pendapatan Lainnya	-	0,04		57,01	-	
JUMLAH PENDAPATAN	30.826,97	6.592,81	21,39	32.595,34	6.623,01	20,32
BELANJA	27.512,44	2.929,71	10,65	28.411,20	2.905,42	10,23
Belanja Pegawai	10.783,77	1.739,89	16,13	11.112,91	1.648,67	14,84
Belanja Barang	8.538,02	844,54	9,89	9.049,32	857,52	9,48
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	32,31	-	-	32,53	3,50	10,76
Belanja Hibah	2.167,27	220,97	10,20	1.335,00	228,18	17,09
Belanja Bantuan Sosial	77,87	-	-	87,26	-	
Belanja Modal	5.864,88	124,27	2,12	6.656,67	167,55	2,52
Belanja Tidak Terduga	48,3	-	-	137,51	-	
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	4.540,89	50,74	1,12	4.405,75	81,94	1,86
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	1.555,07	-		1.486,06	58,58	3,94
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.548,10	-		1.486,06	58,58	3,94
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	6,98	-		-	-	
Transfer Bantuan Keuangan	2985,81	50,74	1,70	2.919,68	23,37	0,80
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	643,13	-		630,12	23,37	3,71

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2336,82	50,74	2,17	2.289,56	-	
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5,86	-		-	-	
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	32.053,33	2.980,45	9,30	32.816,94	2.987,37	9,10
SURPLUS/DEFISIT	-1.226,36	3.311,11		-221,61	3.635,64	

Sumber: BPKAD se-Provinsi Riau

Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau tahun 2019 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer, yaitu Rp25,80 triliun (79,18%), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi Rp23,66 triliun atau 76,76%. Selain itu, pagu belanja juga naik 3,26% dibanding tahun sebelumnya.

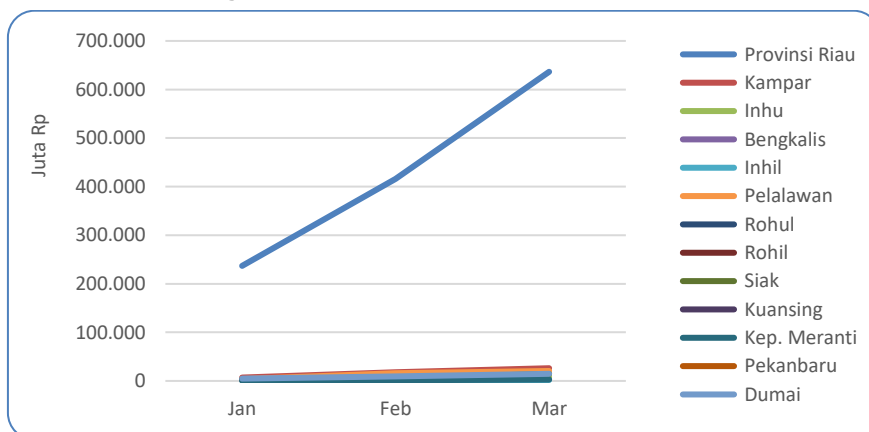
A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2019 sebesar Rp6,6 triliun yang berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp4,74 triliun atau 71,86%, retribusi daerah Rp322,97 miliar (4,9%), hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp357,82 miliar (5,42%), dan lain-lain PAD yang sah Rp1,17 triliun (17,81%). Total realisasi PAD sebesar Rp1,11 triliun atau 16,86% dari total target.

a. Penerimaan Pajak Daerah

Grafik 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2019

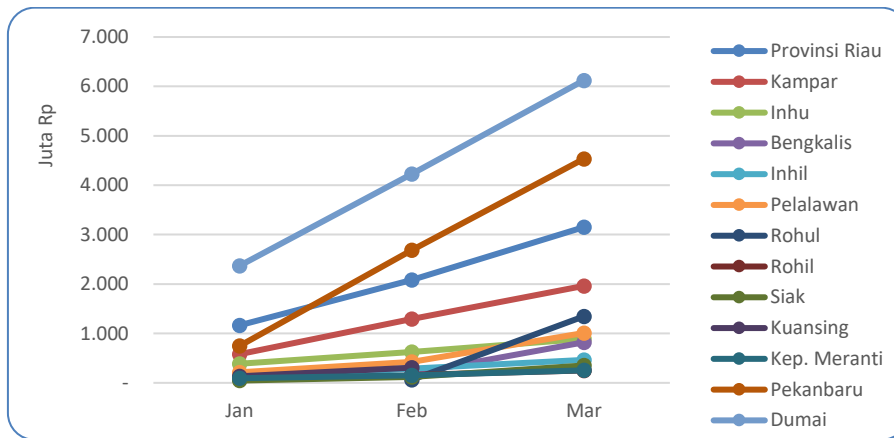


Sumber: BPKAD (diolah)

Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp750,88 miliar atau 15,65% dari target, didominasi oleh Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp654,75 miliar, 87,20% dari total penerimaan pajak daerah diikuti Kabupaten Bengkalis sebesar Rp18,65 miliar (2,70%).

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2019

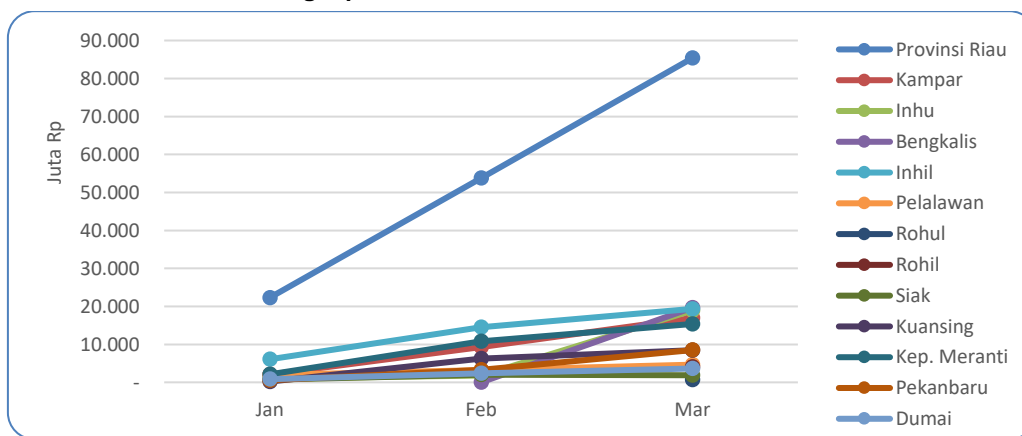


Sumber: BPKAD (diolah)

Penerimaan retribusi daerah direalisasikan Rp32,58 miliar atau 10,09% dari target penerimaan. Penerimaan terbesar berada di Kota Dumai sebesar Rp6,12 miliar (18,79%).

c. Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Grafik 3.3 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2019

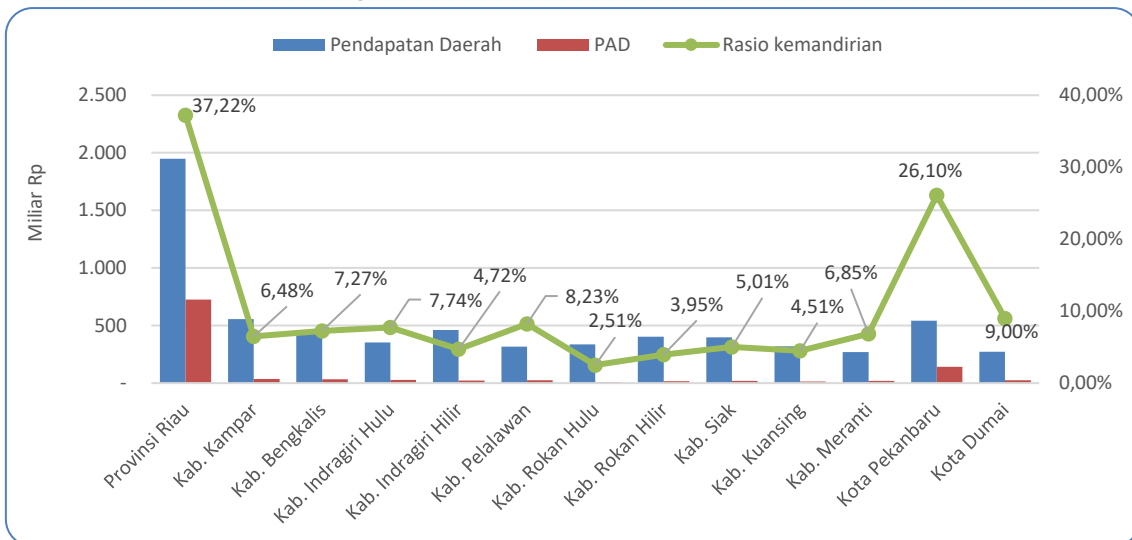


Sumber: BPKAD (diolah)

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi Rp207,43 miliar (17,65%), terbesar berada di Provinsi Riau sebesar Rp85,35 miliar atau 41,15%, diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp19,64 miliar.

Penerimaan PAD memberi kontribusi sebesar 20,24% dari total pendapatan daerah. Hal ini berarti rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (37,22%) dan terendah di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 2,51%.

Grifik 3.4 Perbandingan Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2019



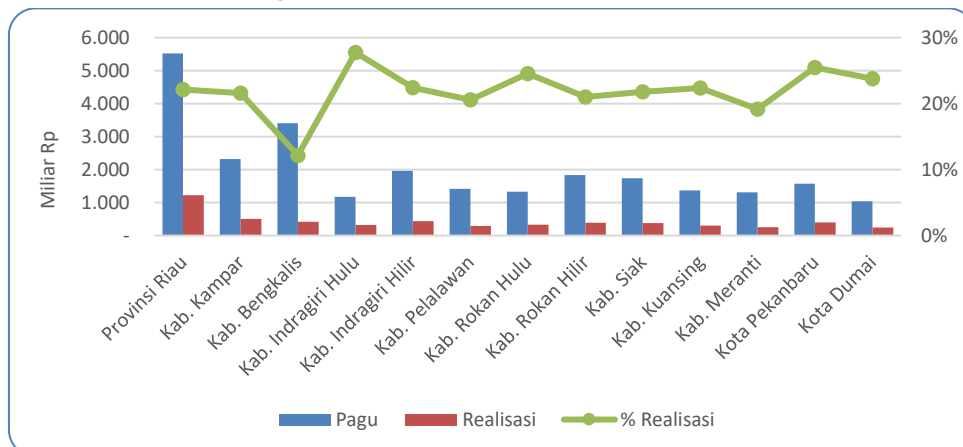
Sumber: BPKAD (diolah)

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Memasuki pekan terakhir Februari 2019 ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah mencapai di angka Rp347,9 miliar dari target Rp3,6 triliun. Kepala Bidang Pajak Bapenda Riau, Ispan S Syaputra, Selasa (26/2/2019) mengatakan, pencapaian realisasi PAD paling besar, bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp157,3 miliar atau 14,8 persen dari target Rp1,06 triliun. Kemudian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) sebesar Rp116, miliar atau 13,65 persen dari target Rp885,4 miliar. Kemudian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) sebesar Rp116, miliar atau 13,65 persen dari target Rp885,4 miliar.

2. Pendapatan Transfer

Target pendapatan transfer se-Provinsi Riau tahun 2019 sebesar Rp25,81 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp5,49 triliun (21,28%). Realisasi pendapatan transfer terbesar berada di Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp1,22 triliun atau 22,15% dari total realisasi pendapatan dan Kabupaten Kampar sebesar Rp501,23 miliar (21,57%).

Grifik 3.5 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2019



Sumber: BPKAD (diolah)

Bisnis.com, PEKANBARU -- Dana Bagi Hasil (DBH) migas untuk Provinsi Riau pada 2017 lalu senilai Rp1,7 triliun, masih belum dibayarkan oleh pemerintah pusat. Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan dari angka itu, sekitar Rp337 miliar merupakan DBH untuk pemprov, sia untuk kabupaten dan kota. "DBH migas yang tunda salur ini harusnya ditransfer di 2018, tapi kenyataannya sampai saat ini belum," katanya Rabu (10/4/2019). Dia menjelaskan nilai DBH yang belum dibayarkan itu hanya untuk tahun anggaran 2017, sedangkan yang tahun lalu sudah ditransfer semuanya.

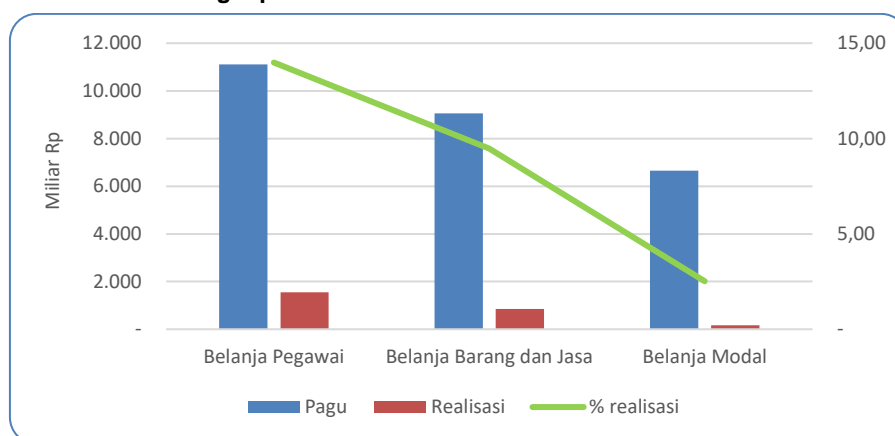
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp189,36 miliar, hanya 0,58% dari total target pendapatan daerah. Target pendapatan ini berasal dari pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan dana darurat. Realisasi pendapatan hibah sampai dengan triwulan I 2019 sebesar Rp798 juta atau hanya 0,60% dari target.

B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Grafik 3.6 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Riau s.d. Triwulan I Tahun 2019



Sumber: BPKAD (diolah)

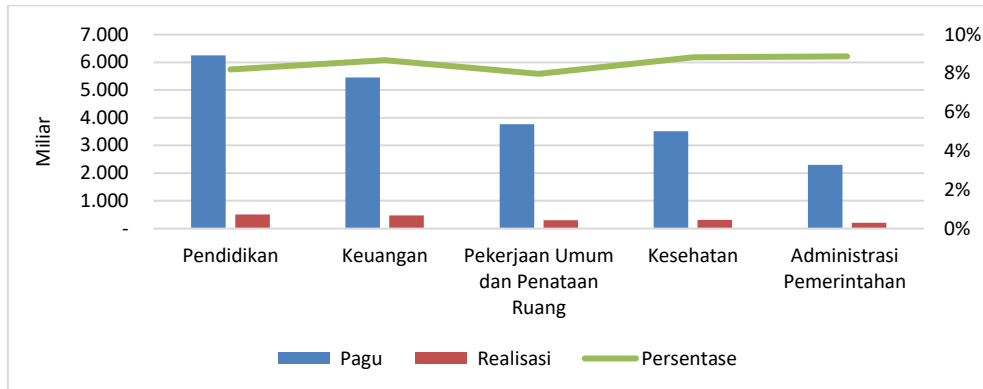
Belanja APBD terbesar adalah belanja pegawai dengan realisasi Rp1,55 triliun, 13,99% dari pagu belanja pegawai atau 56,74% dari total realisasi belanja, diikuti oleh belanja barang dengan realisasi Rp857,52 miliar (29,51% dari pagu belanja). Sementara itu, belanja modal hanya terealisasi Rp167,55 miliar atau 2,52% dari pagu belanja.

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Pagu belanja daerah terbesar digunakan untuk urusan pendidikan, yaitu mencapai Rp6,24 triliun atau 22,67%. Hal ini berarti pemerintah daerah berkomitmen untuk fokus dalam pengembangan pendidikan di daerahnya. Selain itu, pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan kesehatan juga menjadi prioritas utama daerah dengan menyediakan sarana prasarana umum dan kesehatan untuk masyarakat. Selain itu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang mendapatkan porsi

belanja tertinggi adalah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan kesehatan yang masing-masing mendapatkan porsi Rp3,76 triliun dan Rp3,51 triliun.

Grafik 3.7 Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan (Lima Urusan Tertinggi) Lingkup Provinsi Riau Tahun 2019



Sumber: BPKAD (diolah)

Realisasi belanja per urusan digunakan untuk belanja urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan kesehatan masing-masing sebesar Rp512,01 miliar (8,20%), Rp300,10 miliar (8,84%), dan Rp309,99 miliar (7,98%).

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2019

Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2019 diperkirakan dapat direalisasikan sebesar Rp31,15 triliun atau 95,56% dari target pendapatan. Sementara itu, perkiraan belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar Rp30,83 triliun atau 93,96% dari pagu belanja. Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai dengan akhir tahun 2019 di Provinsi Riau.

Tabel 3.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau s.d. Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi thd Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi
Pendapatan Daerah	32.595,34	6.623,01	20,32	31.148	95,56
Belanja Daerah	32.816,94	2.987,37	9,10	30.836	93,96
Surplus/Defisit	(221,60)	3.635,64	(1.640,63)	312	(140,82)

Sumber: BPKAD, diolah dan hasil prognosis menggunakan *forecasting*

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu.

**Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau
s.d. Triwulan I Tahun 2019 (dalam Juta Rupiah)**

Uraian	2019			Kenaikan	2018
	Pusat	Daerah	Konsolidasi		Konsolidasi
Pendapatan Negara	2.588.733	6.553.654	3.377.670	(801.754)	4.179.424
Pendapatan Perpajakan	2.322.368	857.498	3.179.866	(140.191)	3.320.057
Pendapatan Bukan Pajak	266.365	252.289	518.655	(158.899)	677.554
Hibah	0	798	798	30	768
Transfer	0	5.443.068*	(321.649)	(502.694)	181.045
Belanja Negara	6.997.975	2.785.042	4.018.300	175.493	3.842.807
Belanja Pemerintah	1.233.258	2.752.062	3.985.320	193.252	3.792.068
Transfer	5.764.717*	32.980	32.980	(17.759)	50.739
Surplus/(Defisit)	(4.409.242)	3.768.612	(640.630)	(977.247)	336.617
Pembiayaan	0	512.826	512.826	500.522	12.304
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0	512.826	512.826	500.522	12.304
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0	0	0	0
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	(4.409.242)	4.281.438	(127.803)	(587.460)	459.657

Catatan: *) Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah

Sumber: LKPK Triwulan I Tahun 2019 dan 2018 Provinsi Riau

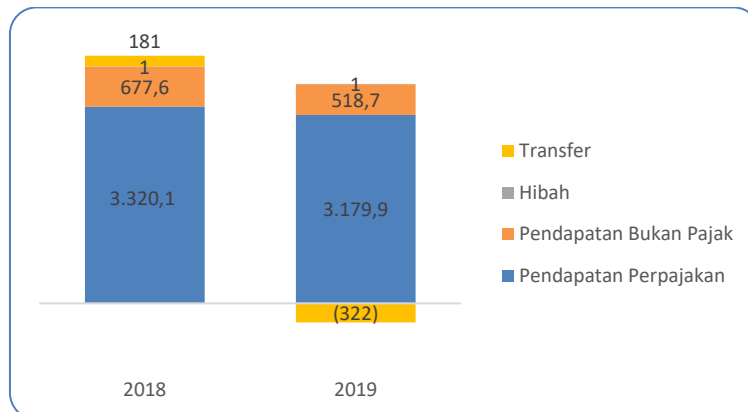
B. Pendapatan Konsolidasian

Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan I tahun 2019 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian, PNPB konsolidasian, pendapatan hibah konsolidasian, dan pendapatan transfer konsolidasian. Realisasi pendapatan konsolidasian mengalami penurunan 19,18% dibandingkan tahun 2018. Penurunan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali pendapatan hibah yang sedikit mengalami kenaikan sebesar 3,91 persen. Pendapatan pajak yang menjadi penyumbang utama pendapatan konsolidasian mengalami penurunan sebesar 19,18%.

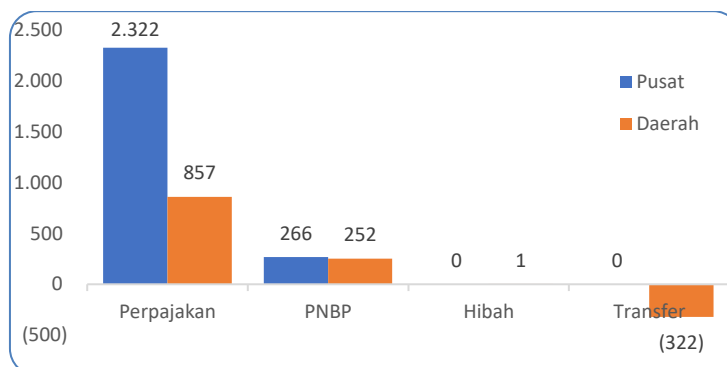
Grafik 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau s.d. Triwulan I Tahun 2019 dan Tahun 2018 (dalam miliar rupiah)



Sumber: LKPK Triwulan I Tahun 2019 dan 2018 Provinsi Riau (diolah)

Realisasi Pendapatan Konsolidasian tahun 2019 sebesar Rp3,38 triliun, sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp3,18 triliun, atau 94,14% dari total pendapatan, diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian Rp518,71 miliar (15,36%). Pendapatan perpajakan konsolidasian mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp3,32 triliun.

Grafik 4.2 Perbandingan Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau s.d. Triwulan I Tahun 2019



Sumber: LKPK Triwulan I Tahun 2019 Provinsi Riau (diolah)

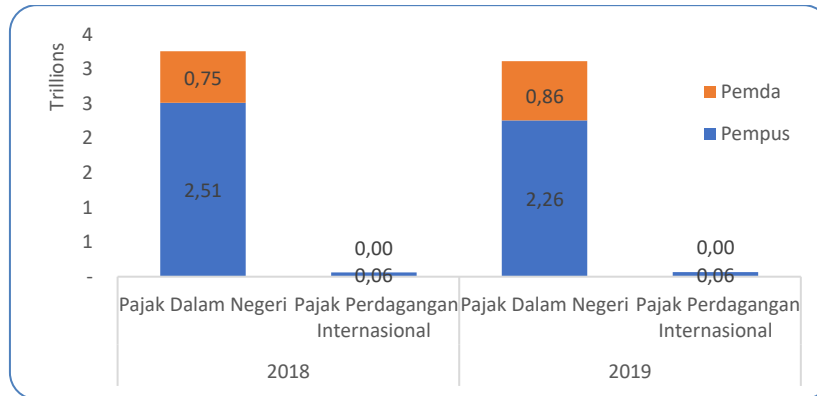
Realisasi pendapatan pemerintah pusat sebesar Rp2,59 triliun dan sebagian besar berasal dari pendapatan perpajakan yang mencapai Rp2,32 triliun. Sementara itu, pendapatan pemerintah daerah didominasi pendapatan transfer sebesar Rp5,44 triliun, kemudian diikuti pendapatan perpajakan sebesar Rp747,35 miliar dan pendapatan bukan pajak Rp266 miliar.

2. Analisis Perubahan

Realisasi pendapatan konsolidasian pada triwulan I tahun 2019 menurun Rp801,75 miliar atau 19,18% yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp140,19 miliar (4,22%) dibanding triwulan I tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan konsolidasian disumbang penerimaan pajak dalam negeri

sebesar 97,96% yang berasal dari pemerintah pusat sebesar 72,47% dan sisanya 28,53% dari pemerintah daerah. Sementara itu penerimaan pajak internasional hanya menyumbang Rp64,92 miliar atau hanya 2,04%.

Grafik 4.3 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian s.d. Triwulan I Tahun 2018 dan 2019



Sumber: LKPK Triwulan I Tahun 2018 dan 2019 Provinsi Riau (diolah)

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2018 dan 2019 (dalam juta rupiah)

Uraian	2018		2019	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Pendapatan Perpajakan	3.320.057	4,67%	3.179.866	-4,22%
PNBP	677.554	-24,45%	518.655	-23,45%
Hibah	768	4,92%	798	3,91%
Transfer	181.045	-	-321.649	-277,66%
Total	4.179.424	2,70%	3.377.670	-19,18%
PDRB/Pertumbuhan Ekonomi	179.860.000	2,91%	184.510.000	2,88%

Sumber: LKPK Triwulan I Tahun 2018 dan 2019 Provinsi Riau (diolah)

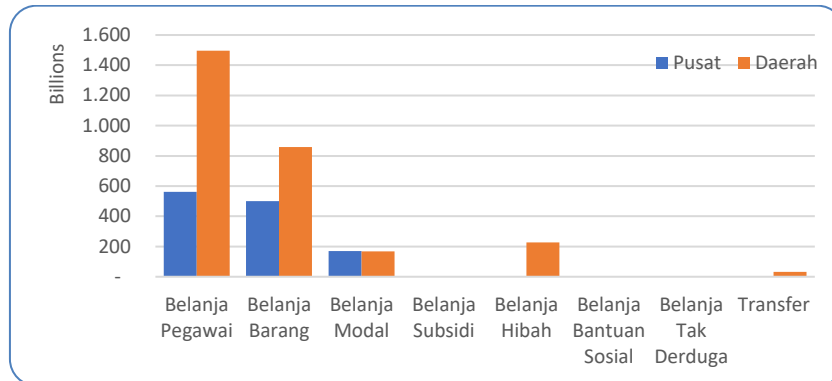
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan I tahun 2019 sebesar 2,88%. Pada periode yang sama, pendapatan yang diterima oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi Rp3,18 triliun atau turun 4,22%. Selisih angka pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan menunjukkan adanya potensi penerimaan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang belum dioptimalkan oleh pemerintah. Namun secara umum pertumbuhan ekonomi ini berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan konsolidasian.

C. Belanja Konsolidasian

Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal.

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik 4.4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Triwulan I 2019



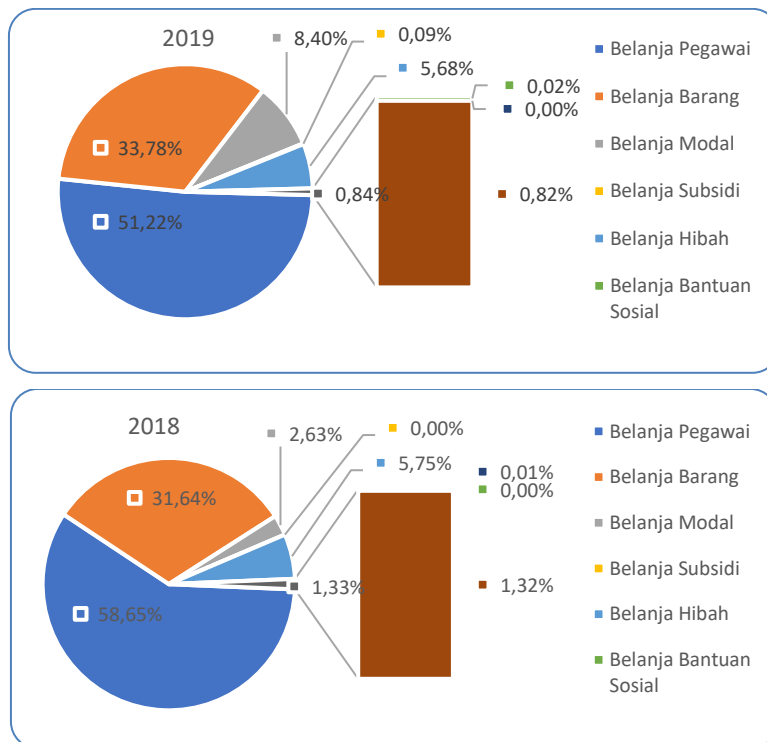
Sumber: LKPK Triwulan I 2019 Provinsi Riau (diolah)

Belanja Konsolidasian triwulan I tahun 2019 Provinsi Riau sebesar Rp4,02 triliun. Porsi terbesar adalah belanja pegawai yang mencapai 52,22%, diikuti oleh belanja barang sebesar 33,78%, sedangkan belanja modal mempunyai porsi 8,40%.

2. Analisis Perubahan

Belanja konsolidasian sebesar Rp4,02 triliun mengalami kenaikan 4,57% dibandingkan tahun 2018. Hampir semua jenis belanja mengalami kenaikan, kecuali belanja tak terduga yang mengalami penurunan.

Grafik 4.5 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2018 dan 2019



Sumber: LKPK Triwulan I 2018 dan 2019 Provinsi Riau diolah)

Komposisi belanja konsolidasian triwulan I 2019 mengalami sedikit perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu. Pada tahun 2019 porsi belanja pegawai mengalami penurunan dari 58,65% menjadi 51,22%, sementara belanja barang dan belanja modal masing-masing naik 2,14% dan 5,77%.

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional

Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi perekonomian regional ke arah yang lebih baik. Untuk mengukur keberhasilan kebijakan fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian regional, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia.

Tabel 4.3 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2018 dan 2019

Indikator Ekonomi Regional	2018	2019
Belanja Pemerintah (miliar rupiah)	3.842	4.018
Pertumbuhan ekonomi (%)	2,91	2,88
Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB (%)	2,14	2,18
Tingkat Kemiskinan (%)	7,78	7,39
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,76	5,57
Indeks Pembangunan Manusia	71,79	72,44

Sumber: LKPK Triwulan I 2018 dan 2019 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penurunan belanja pemerintah dan kontribusi konsumsi pemerintah terhadap PDRB pada tahun 2019 tidak mempengaruhi perbaikan perekonomian regional. Hal ini ditandai dengan naiknya tingkat pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan TPT, serta peningkatan IPM yang mengindikasikan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.

D. Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB

Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi pemerintah dan investasi. Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah untuk kompensasi pegawai, penggunaan barang dan jasa, dan pengeluaran lainnya yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian.

Tabel 4.4 Laporan Operasional Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2019

Uraian	Jumlah
Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto	
Pendapatan:	10.817.946.476.702
Pajak	3.134.559.967.778
Kontribusi Sosial	-
Hibah	166.530.685.078
Pendapatan Lainnya	7.516.855.820.845
Beban:	4.168.131.386.699

Uraian	Jumlah
Kompensasi Pegawai	2.091.727.533.692
Penggunaan Barang dan Jasa	1.319.205.848.737
Konsumsi Aset Tetap	-
Subsidi	3.500.000.000
Hibah	748.441.271.290
Manfaat Sosial	840.000.000
Beban Lainnya	4.416.732.979
Keseimbangan Operasi Bruto/neto	6.649.815.087.002
Transaksi Aset Non Keuangan Neto	337.550.037.017
Aset Tetap	321.606.197.945
Perubahan Persediaan	-
Aset Non Produksi	15.943.839.072
Net Lending/Borrowing	6.312.265.049.985
Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban	
Akuisisi Neto Aset Keuangan	6.312.265.049.985
Dalam Negeri	6.312.265.049.985
Luar Negeri	-
Keterjadian Kewajiban Neto	-
Dalam Negeri	-
Luar Negeri	-

Sumber: LSKP Triwulan I 2019 Provinsi Riau (diolah)

Konsumsi pemerintah pada triwulan I tahun 2018 sebesar Rp1,32 triliun. Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 0,71% dari PDRB Provinsi Riau sebesar Rp184,51 triliun. Sementara itu, kontribusi pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah sebesar 0,17%. Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset tetap yang berjumlah Rp321,61 miliar.

V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. Permasalahan Infrastruktur di Provinsi Riau

Dalam acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2014 pada tanggal 21 Maret 2019, Gubernur Riau mengungkapkan berbagai permasalahan infrastruktur antara lain: (1) dari total jalan provinsi sepanjang 2.799 Km, kondisi kerusakan sedang sampai rusak berat mencapai 55,18%; (2) masih terdapat jenis konstruksi perkerasan jalan yang masih sub standar (kerikil, tanah atau belum tembus) sebesar 34,58%; (3) belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas jalan di Provinsi Riau, indeks aksesibilitas rata-rata tingkat provinsi adalah 0,49 yang berarti rendah; (4) terbatasnya akses air bersih dan air minum yang berasal dari leding/perpipaan; (5) masih rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung produktivitas lahan pertanian.

Pemerintah Pusat mulai tahun 2017 telah mengatur di dalam UU APBN bahwa 25% dari Dana Transfer Umum (DAU+DBH) agar digunakan untuk pembangunan Infrastruktur sebagai mandatory. Di samping itu untuk memenuhi kebutuhan dana infrastruktur tersebut pemerintah daerah perlu melakukan inovasi terhadap sumber-sumber pendanaan pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau lebih dikenal dengan KPBU melalui skema *Unsolicited Project* dan *Availability Payment*, terutama di Bidang Infrastruktur. Skema KPBU telah diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme pembayaran penyediaan infrastruktur melalui *availability payment*. (dimuat di Harian Riau Pos - 08/04/2019).

B. Riau Berhak Dapatkan Perlakuan Khusus

Provinsi Riau selama ini dikenal sebagai daerah penghasil minyak dan gas (migas) dan juga sektor perkebunan yang memiliki kontribusi besar terhadap keuangan negara. Namun hingga saat ini belum ada perhatian khusus pemerintah pusat terhadap Riau.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, secara umum pihaknya menilai perhatian pemerintah pusat ke Riau selama ini masih tergolong biasa. Karena, seharusnya dengan potensi dan kontribusi yang telah Riau berikan kepada negara, harus ada perhatian khusus dari pemerintah pusat ke Riau.

Dengan potensi dan kontribusi Riau tersebut, lanjut sekda, berdasarkan hasil diskusinya dengan staf ahli menteri dalam negeri terkait apakah ada opsi bagi Provinsi Riau untuk mendapatkan otonomi khusus. Menurut staf ahli tersebut, walaupun diberikan otonomi khusus, bukan otonomi khusus regional lagi. "Jadi tidak bisa otonomi khusus regional lagi, tapi otonomi khusus yang sifatnya sektoral. Karena di Indonesia sudah ada lima daerah dengan otonomi regional. Tapi menurut saya, bagi masyarakat Riau tidak ada masalah, Riau menjadi daerah khusus sektoral. Yang penting ada kekhususan," sebutnya.

Karena sekali lagi Sekda menjelaskan, bahwa Provinsi Riau pada tahun 1970-an sempat tersohor dengan migasnya. Tidak hanya itu, dari sektor kehutanan Riau juga punya andil besar terhadap negara yang saat ini sudah melewatinya, dan sekarang hutan produksi Riau juga sangat luas.

Selain itu, sebut Ajmad Hijazi, sektor perkebunan Riau juga saat ini memberikan andil besar terhadap penerimaan negara. Di mana Provinsi Riau adalah daerah dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia yang hampir mencapai tiga juta hektare. (dimuat di Harian Riau Pos - 29/04/2019).



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI RIAU**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.249 PEKANBARU 28116
TELEPON 0761 22686 FAKSIMILI 0761 22647 WEBSITE www.djpbk.kemenkeu.go.id/kanwil/riau

NOTA DINAS

Nomor: ND- 171 /WPB.04/2019

Kepada : Yth. Direktur Jenderap Perbendaharaan
 u.p. Direktur Pelaksanaan Anggaran
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau
Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional Provinsi Riau Triwulan I Tahun 2019
Tanggal : 10 Mei 2019

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini disampaikan Kajian Fiskal Regional Provinsi Riau Triwulan I 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Tri Budhianto